

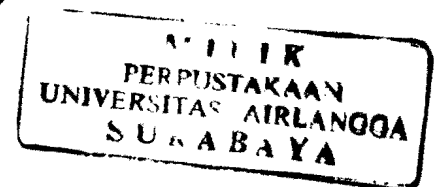
B

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

**(STUDI DESKRIPTIF TENTANG KONFLIK
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA)**

KE
HS P 16/02
Gho
P

SKRIPSI



OLEH :

YUSIANA GHOMAROH

NIM : 079715520

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

2002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh : Yusiana Ghomaroh

NIM : 079715520

Judul : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Deskriptif tentang Konflik Pedagang Kaki Lima di
Kota Surabaya)

Setuju untuk diuji

Mengetahui Dosen Pembimbing



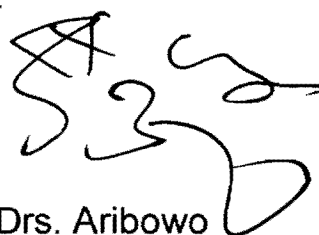
Drs. Haryadi Msi.
NIP. 131 653 466

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Oleh : Yusiana Ghomaroh

Disetujui pada tanggal : 21 Juni 2002

TIM PENGUJI



Drs. Aribowo
NIP. 131 453 806



Drs. Haryadi Msi.
NIP. 131 653 466



Dra. Siti Aminah MA.
NIP. 131 836 624

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu sektor informal dimana sektor ini mampu menjadi katup penyelamat di tengah krisis yang melanda Indonesia. Disaat sektor formal ambruk, Pedagang Kaki Lima mampu bertahan di tengah krisis dan menjadi sumber matapencaharian masyarakat. Di Surabaya keberadaan Pedagang Kaki Lima yang semakin hari semakin menjamur menimbulkan permasalahan bagi wajah Kota. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendekatan hukum guna membina dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Tindakan Pemerintah Kota menyebabkan munculnya konflik Pedagang Kaki Lima. Konflik tersebut didasarkan pada sumber konflik yang menjadi sebab munculnya konflik. Kemudian menghasilkan bentuk-bentuk konflik dan melibatkan aktor-aktor, baik yang diuntungkan maupun dirugikan dan bagaimana mekanisme pengaturan konflik Pedagang Kaki Lima.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif sedangkan teknik penelusuran dan pengumpulan data adalah kualitatif dimana data diperoleh melalui dokumen, observasi dan wawancara yang dilakukan penulis mulai Januari-Mei 2002 terhadap fenomena konflik Pedagang Kaki Lima berdasarkan teori interaksionisme simbolik dan konflik.

Dengan berlandaskan teori dan analisis di atas, ditemukan sumber konflik Pedagang Kaki Lima adalah lokasi sebagai identifikasi usaha dari tiadanya pengakuan PKL dalam sistem Kota. Bentuk-bentuk konflik berupa pelanggaran dan pembongkaran PKL oleh Pemerintah Kota Surabaya dan pembangkangan dan pengerahan massa melalui demonstrasi yang dilakukan PKL terhadap kebijakan Pemerintah. Adapun aktor-aktor yang terlibat dapat dilihat dari struktur konflik yaitu vertikal dan horisontal. Konflik vertikal yaitu antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PKL dan konflik horisontal yaitu intern PKL dan antara PKL dengan pemilik toko. Mekanisme pengaturan konflik melalui penegakan hukum dan secara operasional penertiban PKL di lapangan.

Dari temuan data, ditemukan konflik Pedagang Kaki Lima ini dihasilkan dari kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang sudah tidak relevan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.